

Perumusan Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Landasan, Proses, dan Tantangan dalam Perspektif Pendidikan Islam

***¹Aulia Azalia Nur Estiningtyas, ²Ahmad Firdaus, ³Andri Ansyah,
⁴Nilna Silfara Zukhriya, ⁵Nawa Nasikhatul Milah**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: *¹auliaazalia13@gmail.com

Abstract

Educational policy formulation is a central process in the national education system to respond to various structural and cultural challenges. This article aims to critically analyze the concept of educational policy formulation, its foundations and principles, the stages of the process through evaluation, as well as the challenges and strategies in the context of Islamic education. The method used is a systematic literature review with a qualitative-descriptive approach. The results show that educational policy formulation must be based on four main foundations: philosophical, psychological, sociological, and juridical. Rational, incremental, democratic, and comprehensive principles serve as procedural foundations. The policy stages include problem identification, formulation, legitimation, implementation, monitoring, and evaluation. In Islamic education, the greatest challenges are the dichotomy of knowledge, weak human resource capacity, and the pressures of globalization that erode Islamic values. Recommended strategies include curriculum integration, strengthening Islamic character, improving teacher professionalism, and maslahah-based governance. This article contributes to the development of a contextual and adaptive Islamic education policy theory.

Keywords: *Education Policy; Policy Formulation; Islamic Education; Implementation; Policy Evaluation*

Abstrak

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan proses sentral dalam sistem pendidikan nasional untuk merespons berbagai tantangan struktural dan kultural. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis konsep perumusan kebijakan pendidikan, landasan dan prinsipnya, tahapan proses hingga evaluasi, serta tantangan dan strategi dalam konteks pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka sistematis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan harus bertumpu pada empat landasan utama: filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Prinsip rasional, inkremental, demokratis, dan komprehensif menjadi fondasi prosedural. Tahapan kebijakan mencakup identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dalam pendidikan Islam, tantangan terbesar adalah dikotomi keilmuan, lemahnya kapasitas SDM, serta tekanan globalisasi yang menggerus nilai-nilai Islam. Strategi yang direkomendasikan meliputi integrasi kurikulum, penguatan karakter Islami, peningkatan profesionalisme guru, dan tata kelola berbasis maslahah. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual dan adaptif.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan; Perumusan Kebijakan; Pendidikan Islam; Implementasi; Evaluasi Kebijakan*

PENDAHULUAN

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan proses sentral dalam sistem pendidikan nasional untuk merespons berbagai tantangan struktural dan kultural. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis konsep perumusan kebijakan pendidikan, landasan dan prinsipnya, tahapan proses hingga evaluasi, serta tantangan dan strategi dalam konteks pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka sistematis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan harus bertumpu pada empat landasan utama: filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Prinsip rasional, inkremental, demokratis, dan komprehensif menjadi fondasi prosedural. Tahapan kebijakan mencakup identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dalam pendidikan Islam, tantangan terbesar adalah dikotomi keilmuan, lemahnya kapasitas SDM, serta tekanan globalisasi yang menggerus nilai-nilai Islam. Strategi yang direkomendasikan meliputi integrasi kurikulum, penguatan karakter Islami, peningkatan profesionalisme guru, dan tata kelola berbasis masalah. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual dan adaptif.

Pendidikan nasional Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional: ketimpangan akses, rendahnya kualitas pembelajaran, serta kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja (Hamidah, 2020). Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pendidikan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif dan transformatif. Kebijakan pendidikan, sebagai bagian dari kebijakan publik, memiliki peran strategis dalam mengatur arah, prioritas, dan alokasi sumber daya pendidikan (Tawa, 2024). Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak kebijakan pendidikan gagal mencapai tujuannya karena kelemahan dalam proses perumusan.

Secara konseptual, perumusan kebijakan pendidikan sering dipahami sekadar sebagai pembuatan aturan tertulis. Padahal, proses ini melibatkan analisis masalah, pertimbangan nilai, negosiasi kepentingan, serta proyeksi dampak jangka

panjang (Rahman BP et al., 2022). Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan religius, kebijakan pendidikan juga harus selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas nasional. Kesenjangan antara idealisme pendidikan Islam dan realitas kebijakan nasional menjadi isu kritis yang jarang dibahas secara sistematis.

State of the art dalam kajian kebijakan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif dan legal-formal, sementara aspek filosofis dan sosiokultural kurang mendapat perhatian (Darsyah & Chanifudin, 2020). Penelitian terdahulu juga cenderung memisahkan antara kebijakan pendidikan umum dan pendidikan Islam, padahal keduanya saling terkait dalam sistem nasional. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif kebijakan publik dengan nilai-nilai pendidikan Islam secara simultan, serta menyajikan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif. Tujuan artikel ini adalah: (1) mendeskripsikan konsep perumusan kebijakan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik; (2) mengidentifikasi landasan dan prinsip yang diperlukan; (3) memetakan tahapan ideal proses kebijakan dari formulasi hingga evaluasi; dan (4) merumuskan tantangan serta strategi kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan literature review dengan metode kajian pustaka sistematis dan naratif untuk menganalisis perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia dari aspek landasan, proses, dan tantangannya dalam perspektif pendidikan Islam. Sumber data yang digunakan berupa jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dokumen kebijakan pemerintah, dan hasil penelitian yang relevan. Literatur yang dipilih merupakan publikasi tahun 2019–2026 yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pendidikan, pendidikan Islam, serta tersedia dalam bentuk teks lengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, ResearchGate, Garuda, dan jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan meliputi kebijakan pendidikan, perumusan kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan Islam, implementasi kebijakan pendidikan, dan Islamic education policy. Literatur yang diperoleh

kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas sumber, metodologi penelitian, dan kontribusinya terhadap pembahasan mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu landasan kebijakan pendidikan, tahapan perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta tantangan dan strategi dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam. Selanjutnya, hasil kajian disintesis secara naratif dan interpretatif untuk menghubungkan berbagai temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia serta relevansinya dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai landasan, tahapan, serta faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis cenderung memiliki arah yang lebih jelas dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun, sejumlah kajian juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan evaluasinya di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada landasan kebijakan pendidikan, tahapan dan proses perumusan kebijakan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam perspektif pendidikan Islam, termasuk strategi yang dapat dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu

pendidikan.

Konsep Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas intelektual dan politis yang bertujuan mengidentifikasi masalah, menyusun alternatif solusi, serta merekomendasikan tindakan resmi di bidang pendidikan (Darsyah & Chanifudin, 2020). Dalam proses ini, berbagai informasi, data, dan pertimbangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan pendidikan secara tepat. Perumusan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan aturan atau program, tetapi juga mencakup upaya memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan perkembangan zaman (Darsyah & Chanifudin, 2020).

Berbeda dengan kebijakan publik pada umumnya, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berhubungan langsung dengan proses pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran kebijakan pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi keberhasilan pendidikan. Selain itu, kebijakan pendidikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, peserta didik, orang tua, pemerintah, dan masyarakat luas. Dampak yang dihasilkan pun bersifat jangka panjang dan kumulatif sehingga setiap keputusan yang diambil memerlukan pertimbangan yang matang. Sejalan dengan itu, Hamidah (2020) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang harus dirumuskan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas (Tawa, 2024).

Meskipun demikian, praktik perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kebijakan yang dirancang secara top-down dengan dominasi pemerintah pusat, sementara keterlibatan aktor

lapangan seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat masih relatif terbatas. Kondisi ini sering kali menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah sehingga implementasinya tidak berjalan optimal. Nurhakim et al. (2025) menunjukkan bahwa minimnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dapat menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan pendidikan, dari yang bersifat administratif menuju proses yang lebih deliberatif, partisipatif, dan berbasis bukti. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi yang kuat, tetapi juga lebih relevan, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan pendidikan secara efektif.

Landasan dan Prinsip Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan proses strategis yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah pendidikan, tetapi juga menentukan arah pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan landasan yang kuat agar memiliki legitimasi, relevansi, dan daya implementasi yang tinggi (Efendi et al., 2025). Landasan tersebut berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menghubungkan tujuan pendidikan nasional dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial yang terus berubah. Tanpa adanya landasan yang jelas, kebijakan pendidikan berpotensi kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Landasan filosofis menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan pendidikan karena berkaitan dengan pandangan mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, serta nilai-nilai yang ingin diwujudkan melalui proses pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara pengembangan intelektual, moral, dan sosial peserta didik (Arsyad & Sauri, 2024). Landasan filosofis ini menjadi pedoman dalam menentukan arah kurikulum, strategi pembelajaran, maupun tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan

tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Selain landasan filosofis, landasan psikologis memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan selaras dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik (Sukmadinata, 2009). Perumusan kebijakan yang mengabaikan aspek perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik berisiko menghasilkan program yang sulit diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait kurikulum, metode pembelajaran, maupun sistem evaluasi harus mempertimbangkan teori-teori perkembangan dan belajar sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus berpijak pada pemahaman ilmiah mengenai proses belajar manusia.

Pada saat yang sama, landasan sosiologis menempatkan pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial yang selalu dipengaruhi oleh dinamika Masyarakat (Maghfiroh & Rohmah, 2024). Kebijakan pendidikan harus mampu merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan pembangunan nasional. Pendidikan yang tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat akan menghasilkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan perkembangan lingkungan sosial agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan kontekstual.

Sementara itu, landasan yuridis memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai regulasi seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar normatif yang mengarahkan seluruh kebijakan pendidikan di Indonesia (Tawa, 2024). Landasan yuridis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan agar implementasi kebijakan tetap

berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, setiap kebijakan pendidikan memperoleh legitimasi serta memiliki kekuatan untuk diterapkan secara konsisten di berbagai jenjang pendidikan.

Dalam proses perumusannya, kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat menjamin efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Prinsip rasional menekankan pentingnya penggunaan data, fakta, dan analisis ilmiah dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan pendidikan secara objektif. Prinsip inkremental menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebijakan yang telah ada sebelumnya agar proses implementasi berjalan lebih adaptif dan minim resistensi. Sementara itu, prinsip demokratis mengharuskan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, guru, peserta didik, dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.

Lebih lanjut, prinsip komprehensif menghendaki bahwa perumusan kebijakan dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Prinsip ini penting karena keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan (Darsyah & Chanifudin, 2020). Dengan mengintegrasikan berbagai landasan dan prinsip tersebut, kebijakan pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks sekaligus mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional secara optimal.

Tantangan dan Strategi dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Islam

Perumusan kebijakan pendidikan Islam pada era kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global tanpa

meninggalkan identitas dan nilai-nilai keislaman. Kondisi ini menempatkan pendidikan Islam pada posisi yang strategis sekaligus menantang, karena kebijakan yang dirumuskan harus mampu mengintegrasikan tuntutan modernitas dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi spiritual, moral, dan sosial peserta didik.

Salah satu tantangan utama dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam adalah adanya ketidaksinkronan antara idealisme pendidikan Islam dan realitas kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan Islam pada hakikatnya menempatkan pembentukan karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan sebagai tujuan utama, sedangkan berbagai kebijakan pendidikan sering kali lebih menitikberatkan pada pencapaian akademik, standar kompetensi, dan indikator administratif. Akibatnya, nilai-nilai Islam belum sepenuhnya menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan, melainkan lebih sering ditempatkan sebagai pelengkap dalam sistem pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif pendidikan Islam dan praktik pendidikan yang berlangsung di lapangan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan (Darmansah et al., 2025). Tidak semua pengambil kebijakan, pengelola lembaga pendidikan, dan tenaga pendidik memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep kebijakan pendidikan Islam secara komprehensif. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan sering kali belum mampu mengakomodasi prinsip-prinsip pendidikan Islam secara optimal. Selain itu, keterbatasan kompetensi guru dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang holistik. Permasalahan ini semakin diperkuat oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran yang masih dihadapi oleh sebagian lembaga pendidikan Islam.

Di sisi lain, globalisasi dan perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi pendidikan Islam (Helmiati & Arfan, 2025). Arus informasi

yang semakin terbuka membawa berbagai nilai dan budaya yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman. Kondisi tersebut menuntut pendidikan Islam untuk lebih adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Namun, kemampuan adaptasi tersebut sering kali terkendala oleh lambatnya respons kebijakan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tuntutan zaman dengan kesiapan lembaga pendidikan Islam dalam memberikan layanan pendidikan yang relevan dan berkualitas.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi perumusan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan pendidikan modern. Strategi pertama adalah memperkuat landasan filosofis kebijakan pendidikan Islam dengan menjadikan nilai tauhid, keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut akan lebih mampu mengarahkan pendidikan Islam pada pencapaian tujuan yang tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, baik secara spiritual maupun akademik.

Strategi berikutnya adalah melakukan integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum maupun proses pembelajaran (Helmiati & Arfan, 2025). Integrasi ini penting untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini masih menjadi persoalan dalam pendidikan Islam. Melalui pendekatan integratif, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik yang relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi strategi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan Islam

(Darmansah et al., 2025). Guru dan tenaga kependidikan perlu memperoleh pelatihan yang berkelanjutan agar memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan keislaman yang memadai. Penguatan kompetensi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan secara efektif dalam praktik pendidikan sehari-hari. Pada saat yang sama, pengembangan kapasitas para perumus kebijakan juga diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan Islam dan perkembangan masyarakat.

Strategi lainnya adalah memperkuat sistem manajemen pendidikan Islam melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan. Manajemen yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi keagamaan perlu diperkuat agar proses perumusan kebijakan lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena keberhasilan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat, tetapi juga oleh dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berasal dari faktor internal lembaga pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, penguatan sumber daya manusia, reformasi kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta penguatan tata kelola pendidikan. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan tujuan utamanya sebagai sarana pembentukan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

KESIMPULAN

Perumusan kebijakan pendidikan Islam merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang mencakup tahapan identifikasi masalah, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi, monitoring, hingga evaluasi. Setiap tahapan memiliki peran yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, proses perumusannya harus didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis yang kuat agar mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.

Dalam praktiknya, perumusan kebijakan pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksinkronan antara idealisme pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional, keterbatasan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, globalisasi, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan menjadi faktor penting untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif melalui penguatan landasan nilai-nilai Islam, integrasi ilmu pengetahuan dan nilai keislaman dalam kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penguatan manajemen dan tata kelola pendidikan. Di samping itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi keagamaan perlu terus ditingkatkan agar kebijakan yang dirumuskan memiliki legitimasi, daya implementasi, dan keberlanjutan yang kuat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam diharapkan mampu

beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan tujuan utamanya dalam membentuk generasi yang unggul secara intelektual, spiritual, dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, H., & Sauri, S. (2024). Landasan Filosofi Pendidikan dan Konsep Mendidik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1585–1596.
- Darmansah, T., Ramadhani, P. S., Lubis, D. M. B., & Sembiring, D. F. (2025). Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 3(1), 304–313.
- Darsyah, S., & Chanifudin. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. *At-Thullab: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 116–133.
- Efendi, A. S., Musthofa, R., & Zakki, M. (2025). Landasan-Landasan, Tujuan dan Fungsi Pendidikan. *JOECIE: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 3(2), 44–54.
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 35–44.
- Helmiati, & Arfan, S. (2025). Malaysia's Islamic Education Policies in Addressing the Challenges of Globalization. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 128–143.
- Landasan Filosofis. (n.d.). *Pengertian Landasan Filosofis dan Komponen Pengetahuan*. [Kajian Literatur Internal].
- Maghfiroh, A., & Rohmah, L. (2024). Analisis Landasan Sosiologi Dalam Pendidikan. *Al-Haytham: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 60–71.
- Nurhakim, H. Q., Hakim, A. R., Basuki, Rahmat, M., Supiana, & Zakiah, Q. Y. (2025). Perumusan, Formulasi, dan Adopsi Kebijakan Pendidikan. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(2), 150–165.
- Rahman BP, A., Yusdayanti, Nawir, M., & Quraisy, H. (2022). Formulasi Kebijakan Pendidikan. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(1), 45–52.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Landasan Psikologi dalam Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tawa, A. B. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional dan Implementasinya pada Sekolah Dasar. *JGSD: Jurnal Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 107–117.